

Pemikiran Politik Sunni Sebagai Alat Legitimasi Kekuasaan

Toguan Rambe

Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan
toguanrambe4@gmail.com

Seva Mayasari

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
sevamayasari@uinsu.ac.id

Abstrak

Pemikiran politik sunni memegang peran dan memiliki subangsi besar dalam pemerintahan, Doktrin sunni yang cenderung sebagai alat legitimasi kekuasaan, sangat memiliki dampak besar dengan pemerintah dalam meletakan hubungan antar penguasa (pemerintah) dan rakyat dengan mengutamakan keharmonisan sosial, tentu hal ini akan dapat menciptakan harmonisasi dan kestabilan sosial dan politik. Kelompok mayoritas ini diantaranya diwakili oleh, Ibn Abi Rabi', Ibn Taimiyah dan al Ghazali serta al Mawardi. Pemikiran tersebut dilatabelakangi oleh pengalaman yang dialami dan dihadapi oleh tokoh-tokoh sunni pada masa mereka. Mereka mendasarkan teori politiknya atas kenyataan dan situasi sosial politik yang ada.

Kata kunci: Politik sunni, legitimasi, kekuasaan

Abstract

Sunni political doctrine plays an important role in government, sunni doctrine which tends to be an instrument of legitimacy of power, has a great impact with the government in putting relations between the authorities (government) and the people by prioritizing social harmony, of course social and political stability will be well maintained. the majority of which are represented by, Ibn Abi Rabi ', Ibn Taimiyah and al Ghazali and al Mawardi. This thinking is based on the background and tendencies of these Sunni figures in the political problems of the state faced in their time. They base their political theory on reality and the existing socio-political situation.

Keywords: Sunni politics, legitimacy, power

Pendahuluan

Sunni merupakan kelompok mayoritas dalam dunia politik Islam. Dalam konteks politik, istilah sunni lebih dikenal dan untuk membedakannya dengan kelompok-kelompok politik lainnya dalam dunia politik Islam, seperti Syiah dan Khawarij. Kelompok yang sering juga disebut dengan *ahlul sunnah wa al jama'ah* sesuai dengan sikapnya yang moderat. Doktrin sunni memegang peranan penting

dalam pemerintahan, dan cenderung sebagai alat legitimasi kekuasaan, sangat memiliki dampak besar dengan pemerintah dalam meletakkan hubungan antar penguasa (pemerintah) dan rakyat dengan mengutamakan keharmonisan sosial, tentu stabilitas sosial dan politik akan terjaga dengan baik.

Sunni sebagai kelompok mayoritas, memiliki khas pemikiran politik yang biasanya mendukung atau memihak pemerintah yang sedang berkuasa. Pemikiran-pemikiran dari ulama-ulama politik sunni cenderung mempertahankan kekuasaan. Dan tidak jarang pula menjadi pemikiran politik dan kenegaraan yang sebagai alat legitimasi bagi kekuasaan khalifah yang memerintah. Kalangan ulama sunni pada umumnya melarang rakyat (umat Islam) melakukan pemberontakan atau oposisi terhadap penguasa.¹

Pada dunia perpolitikan kelompok ini berpegang pada doktrin kelompok mayoritas yang diantaranya diwakili oleh Ibn Abi Rabi, Ibn Taimiyah dan Al Ghazali serta Al Mawardi. Tokoh-tokoh kalangan sunni ini meskipun pada dasarnya memiliki kesamaan dalam pemikiran politiknya, namun dilatarbelakangi sosial politik yang berbeda pada masanya.

Pembahasan

1. Pemikiran tokoh-tokoh politik Sunni

Doktrin politik sunni tentang kepatuhan dan taat terhadap pemimpin dan larangan untuk melakukan oposisi atau pemberontakan terhadap penguasa, dapat dilihat sumbernya dari pandangan beberapa tokoh-tokoh politik dan ketatanegaraan Sunni mengenai sumber kekuasaan dan kewenangan penguasa. Kelompok Sunni biasanya menganggap bahwa kekuasaan khalifah (kepala Negara) berasal dari Tuhan. Kecuali al mawardi mempunyai pemikiran berbeda terkait sumber kekuasaan khalifah (kepala Negara). Namun tetap menekankan pada kepatuhan terhadap pemimpin.

a. Ibn Abi Rabi'

Ibn Abi Rabi' merupakan pemikir sunni yang hidup pada abad ke-3 H/9 M di masa pemerintahan al Mu'tasim, Khalifah Bani Abbas yang ke delapan. Dalam sejarah Islam khalifah Abu Ja'far al Mansur dari Bani Abbas memperkenalkan dirinya sebagai khalifah (wakil) Tuhan di bumiNya. Pernyataan ini menunjukan

¹ Ibn Taimiyah, *Al Siyasah al Syar'iyah fi Ishlah al Ra'I wa al Ra'iyah* (Beirut Dar al Afaq, 1983),h.162

bahwa khalifah merupakan perwakilan Tuhan di bumi dan memerintah berdasarkan mandat dari Tuhan. sehingga kekuasaanya suci dan mutlak serta harus dipatuhi. Dengan kata lain bahwa Khalifah adalah bayang-bayang Allah di dunia. Pandangan ini dibenarkan oleh Ibn Abi Rabi' sebagai dasar bagi legitimasi keistimewaan hak-hak kepala Negara (khalifah) atas rakyatnya dalam ajaran agama didasari pada surat al An'am 6: 165 dan al Nisa, 4 : 59 ;

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Dialah (Allah) yang telah menjadikan kamu sebagai penguasa penguasa di bumi ini dan Dia pula yang meninggikan sebagian atas sebagian lainnya beberapa derajat” (QS. Al An'am, 6: 165)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.” (QS. Al Nisa', 4 : 59)

Ibn Abi Rabi' berpendapat bahwa kedua ayat diatas merupakan landasan pemikiran tentang kepatuhan terhadap pemimpin, kedua ayat tersebut menjelaskan penegasan Allah bahwa Ia telah memberikan keistimewaan kepada para pemimpin (raja) dengan segala keutamaannya dan memperkuat kedudukan mereka di bumi Nya. Oleh sebab itu, Allah telah memberikan mandat dan mempercayakannya untuk memimpin hamba-hamba yang lain. Selain itu Allah juga memerintahkan untuk mengormati , mengagungkan dan menaati perintah mereka.²

b. Al Ghazali

Al ghazali (1058-1111 M) juga memiliki pandangan yang sama dengan Ibn Abi Rabi' namun dengan teks yang berbeda. Al ghazali berpandangan bahwa tuhan merupakan sumber kekuasaan. Kemudian Tuhan memberikan kekuasaan tersebut kepada sebagian-sebagian hambaNya (kepala Negara). Sehingga hal ini membuat kekuasaan kepala Negara menjadi bersifat sakral dan suci, dan rakyat harus patuh dan taat pada kepala Negara.

Dalam pemikiran politik al Ghazali prinsip kepatuhan terhadap kepala Negara sangat ditekankan. Dalam karyanya *al Tibr al Masbuk*, al Ghazali menyatakan bahwa Allah telah memilih dua kelompok manusia. Kelompok

² Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta : UI Press,1990),h.47-48

pertama adalah para nabi dan rasul Allah. Mereka merupakan utusan Allah yang diutus untuk memberikan penjelasan kepada manusia lainnya tentang petunjuk dan dalil-dalil beribadah kepadaNya. Selain itu, mereka juga bertugas menjelaskan kepada manusia tentang bagaimana cara mengenal Allah. Kelompok kedua adalah penguasa. Kelompok yang diutamakan Allah karena mereka dapat menjaga umat manusia dari sikap permusuhan yang dapat menciptakan perpecahan antara satu dengan yang lainnya. Kemaslahatan umat manusia di bumi sangat terkait erat dan bergantung dengan keberadaan penguasa ini. Dengan kekuasaan yang mereka miliki, Allah menempatkan mereka pada posisi yang terhormat. Sehingga, orang yang diberi pangkat atau kekuasaan oleh Allah sebagai penguasa dan dijadikan sebagai pengganti Tuhan dan pengayom di muka bumi. Maka setiap orang umat manusia wajib mencintai, tunduk dan mematuhi. Mereka tidak dibenarkan dan dilarang untuk menentang ataupun mendurhakainya. Al ghazali mengutip sebagaimana firman Allah “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil al amri diantara kamu*”. Al ghazali berpendapat bahwa penguasa (pemimpin) adalah bayang-bayang Allah di muka bumi dan kekuasaannya berasal dari Tuhan. Karena penguasa menurut al-Ghazali dipilih oleh Tuhan,³

Selain itu al ghazali juga menegaskan melarang dan tidak membenarkan umat (orang Islam) melakukan pemberontakan kepada kepala Negara (pemimpin). Beliau juga menambahkan, bahwa pendirian Negara bukan hanya berdasarkan pertimbangan rasio semata, namun juga berdasarkan perintah Syari’. Menurutnya sungguh tidak mungkin jika ajaran-ajaran dan hukum agama dapat berjalan dengan baik jika keadaannya tidak memadai dan mendukung. Sedangkan alat pendukungnya sendiri merupakan Negara. Dalam teorinya, al ghazali menyatakan bahwa agama merupakan landasan atau basis bagi menjalankan kehidupan manusia (masyarakat) sedangkan kekuasaan politik merupakan penjaganya. Keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dan keterkaitan. Politik tanpa didasari agama dapat hancur, sedangkan agama tanpa ada kekuasaan politik bisa hilang dan tidak bisa berjalan dalam kehidupan masyarakat. Kekuasaan politik atau penguasa merupakan penjaga bagi pelaksanaan hukum agama.⁴ Dalam

³ Muhammad Iqbal, *Akar Tradisi Politik Sunni di Indonesia pada Masa Kerajaan Islam di Nusantara* (ISLAMICA, Vol. 6, No. 1, September 2011),h.55

⁴ Al Ghazali, *Al Iqtishad fi al I'tiqad* (Mesir : Maktabah al Jund, 1972),h.198-199

pemikiran al-Ghazali ini dasar al-maslahat (kemanfaatan hidup manusia) tampaknya dijadikan dasar dalam merumuskan teori kenegaraannya, dasar al-maslahat itu terlihat dengan ungkapannya : *Ma Laa Yatimmu ad-Diin Illa Bihi* (agama itu tidak akan jalan dengan sempurna tanpa adanya Negara).⁵

c. Ibn Taimiyah

Senada dengan Ibn Abi Rabi' dan Al Ghazali, Ibn Taimiyah juga menyatakan bahwa umat Islam membutuhkan kepala Negara tidak hanya sekedar untuk menjamin jiwa dan harta namun juga untuk menjamin terselenggaranya hukum-hukum Tuhan.

Oleh sebab itu kepala Negara merupakan bayang-bayang Allah di bumi. Kekuasaan dan kewenangannya berasal dari Allah.⁶ Bahkan Ibn Taimiyah mengharamkan rakyat (umat Islam) melakukan pemberontakan ataupun oposisi terhadap kepala negara, bahkan meskipun kafir. Selama ia masih dapat menjalankan keadilan dan tidak memerintahkan berbuat maksiat kepada Allah. Ibn Taimiyah mengutip sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa barangsiapa yang melihat sesuatu uyang tidak disenangi dari pemimpinnya, maka hendaklah ia bersabar. Barang siapa yang keluar dari pemerintahannya (melakukan pemberontakan) dan jika ia mati, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah.⁷

Ibn Taimiyah berpandangan bahwa kepemimpinan dalam sebuah masyarakat merupakan sesuatu yang wajib dan sangat penting. Sebuah komunitas masyarakat tanpa adanya pemimpin tentu akan berujung pada kondisi kacau, karena pada dasarnya manusia memiliki sifat homo homini lupus, hal ini berarti siapa yang kuat maka dialah yang akan berkuasa. Oleh karena itu, kondisi masyarakat tanpa pemimpin bisa dipastikan lebih buruk daripada komunitas masyarakat yang dipimpin oleh orang yang dzalim atau bodoh.

Sebegitu yakinnya ibn Taimiyah terhadap keharusan otoritas Negara sehingga iapun mengatakan bahwa “ Sesungguhnya raja adalah bayangan Allah diatas bumi” dan ia juga mengatakan bahwa “ enam puluh tahun berada dibawah kekuasaan imam yang dzalim itu lebih baik daripada satu malam tanpa seorang

⁵ Jeje Abdul Rojak, *Politik Kenegaraan Pemikiran-Pemikiran Al-Ghazali dan Ibn Taimiyah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1999), h. 95. Lihat al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din I* (Bairut: Dar al-Fikr, 1995), h. 31.

⁶ Ibn Taimiyah, *Al Siyasah Al Syar'iyah...*, h.162

⁷ *Ibid*,

imam (pempimpin)”⁸ sepertinya dalam hal ini Ibn Taimiyah lebih suka menggunakan teori stabilitas dan lebih mengutamakan kemaslahatan dan keharmonisan sosial.

d. Al Mawardi

Berbeda dengan ketiga tokoh sunni diatas, Al Mawardi (9975-1059 M) menyatakan bahwa kekuasaan kepala Negara bersumber dari perjanjian antara kepala Negara rakyatnya atau yang sering disebut juga berdasarkan kontrak sosial. Dari perjanjian ini maka lahirlah hak dan kewajiban antara kedua belah pihak secara timbal balik. Oleh karena rakyat telah memberikan kekuasaan dan sebagian haknya kepada kepala negara, maka tentu rakyat berhak menurunkan kepala negara bila iadianggap rakyat tidak mampu lagi dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Dengan demikian menurut pandangannya ini, al mawardi tidak menganggap kekuasaan kepala negara merupakan sesuatu yang suci ataupun sakral.

Adapun yang menarik dari hal ini, bahwa teori kontrak sosial telah diperkenalkan pada awal abad XI Masehi oleh al Mawardi, dan baru lima abad kemudian, yitu sekitar abad pertengahan abad XVI Masehi baru mulai bermuculan teori-teori kontrak sosial di Barat.⁹

Dengan demikian al Mawardi merupakan satu-satunya pemikir politik Islam zaman abad pertengahan yang berpendapat bahwa kepala negara dapat diganti atau diturunkan dari kursi keuasannya, jika ternyata tidak mampu lagi melaksanakan tugas yang diamanahkan kepadanya. Meskipun al Mawardi tidak memberi cara atau mekanisme secara rinci dan jelas bagaimana pergantian kepala negara itu. Namun al Mawardi memberikan penjelasan tentang bagaimana ahl al ikhtiar atau ahl al hall wa al aqd itu diangkat, dan dari kalangan mana, berdasarkan kualifikasi pribadi atau perwakilan kelompok.

Namun, al Mawardi senada dengan pemikir sunni sebelumnya yang menekankan kepatuhan dan ketaatan kepada kepala negara yang telah di pilih. Kepatuhan ini tidak hanya kepada kepala negara yang adil atau baik saja, namun juga yang jahat. Untuk mendukung pendapatnya ini, al Mawardi mengutip sebuah

⁸ Ibn Taimiyah, *Al Siyasah al Syar'iyah fi Ishlahi al Ra'I wa al Ra'iyah*, cet.2 (Mesir, Dar al Kitab al Arabi, 1951),h.172-173

⁹ Syafruddin Syam, *Pemikiran Politik Islam Imam Al Mawardi dan Relevansinya di Indonesia* (Jurnal Al Hadi, Vol.II,No.02, Edisi Januari-Juni 2017),h.493

hadis riwayat Abu Hurairah: ¹⁰ akan ada kelak pemimpin-pemimpin kamu sesudahku. Diantara mereka ada yang baik memimpinmu dengan kebajikannya. Tapi ada juga yang jahat dan memimpinmu dengan kejahatannya. Dengarkanlah dan patuhilah mereka sesuai dengan kebenaran. Jika mereka berbuat baik, maka kebajikannya untuk kamu dan untuk mereka. Tetapi jika mereka berbuat jahat, maka akibat baiknyanya untuk kamu dan kejahatannya kembali kepada mereka.

2. Pemikiran politik Sunni sebagai alat legitimasi kekuasaan

Pemikiran-pemikiran tokoh politik Sunni demikian akhirnya menggambarkan prinsip yang lebih mengutamakan keharmonisan dan kestabilan dalam politik Islam. Pemikiran tersebut didasarkan pada latar belakang dan kecenderungan tokoh-tokoh Sunni tersebut dalam persoalan politik kenegaraan yang dihadapi pada masa mereka. Mereka mendasarkan teori politiknya atas kenyataan yang ada, dengan bertitik tolak pada pemberian legitimasi (keabsahan) kepada sistem pemerintahan yang sedang berjalan atau mempertahankan status quo bagi kepentingan penguasa dan kemudian secara realistik menawarkan saran-saran perbaikan dan reformasi.

Dalam teori politik Sunni, institusi pemerintahan adalah simbol tertinggi syariah. kesadaran bahwa syariah menjadi pegangan bagi umat Islam. Namun, realitasnya tidak demikian, Khalifah Abbasiyah menentukan lain. Barangkali inilah yang menjadi salah satu sebab pemikir-pemikir sunni menempuh jalan kompromi dalam perumusan teori politiknya sekalipun mengorbankan cita-cita syariah.

Ibn Abi Rabi' yang menulis *Sulik al-Malik fi Tadbir al-Mamalik* merupakan karya persembahan kepada Khalifah Dinasti Abbasiyah, al-Mu'tashim (833-842 M). Tentu saja sebagai buku persembahan, Ibn Abi Rabi' tidak melakukan kritik terhadap khalifah. Ia pun memuji-muji al-Mu'tashim sebagai khalifah yang adil, bijaksana yang mampu memberikan kesejahteraan rakyatnya. Karena itu, Ibnu Abi Rabi' menekankan kepatuhan mutlak rakyat kepada khalifah.

Sama halnya dengan Ibn Abi Rabi', al-Mawardi juga menekankan kepatuhan terhadap pemimpin (kepalanegara). Dengan posisi al-Mawardi pada saat itu merupakan seorang tokoh dan pemikir handal di pusat pemerintahan, yang

¹⁰ Al Mawardi, *Al ahkam al Sulthaniyah* (Beirut : Dar al Fikr,t.tp), h.5

berusaha mengatasi permasalahan politik ini sebagai upaya menjembatani kesenjangan yang terjadi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang dipimpin oleh para Gubernur, para Sulthan, dan para Amir.al-Mawardi berusaha menjelaskan hubungan antara keduanya dalam kerangka terciptanya situasi politik yang kondusif.

Pemikiran politik al-Mawardi yang dituangkan secara lengkap dalam karyanya yang berjudul *alAhkam al-Sulthaniyyah*, karya ini merupakan upaya menegaskan kekuasaan Khalifah Abbasiyah melawan para penguasaan (amir) dinasti Buwayhiyah yang sangat efektif pengaruhnya, dan untuk menghadapi ekspansi pengaruh dinasti Fatimiyah Ismailiyah di Mesir. Namun, dalam pemikiran politik al mawardi tidak menjelaskan bagaimana sebuah pemerintahan yang baik sehingga ini dianggap sebagai bentuk dukungan keberpihakan terhadap penguasa saat itu, kekhalifahan Abbasyiah yang disinyalir banyak melakukan pelanggaran dalam kekuasaan. seyogyanya seorang khalifah harus mampu menentukan arah perjalanan pemerintahan secara independen, tanpa ada gangguan dari orang-orang dekatnya Namun kenyataannya pada masa Abbasyiah, khalifah tidak banyak melakukan apa-apa. seandainya al-Mawardi pada saat itu dalam karyanya menjelaskan secara rinci ide-ide besarnya tentang pemerintahan yang baik pada saat itu, tentunya banyak di antara khalifah dari bani Abbasyiah yang harus lengser demi hukum karena tidak dapat melaksanakan mandat pemerintahan dengan baik. Hal ini sangat mungkin karena al-Mawardi sendiri sebagai Qadhi al-Qudhat.

Selain faktor sosial politik pada saat itu yang mempengaruhi pemikiran al mawardi, pemikiran almawardi juga terinspirasi dari tokoh-tokoh abad sebelumnya seperti plato, aristoteles dan ibn abi rabi'. Hal ini terlihat bagaimana ia memberikan teori tentang pendirian Negara.

Al-Ghazali mengakui status quo dan membelanya atas dasar kemaslahatan umum. Demi tujuan-tujuan praktis, bahkan seorang sultan yang tidak adil harus dipatuhi sepenuhnya. Alasan yang dikemukakan sangat bijak, dan sejalan dengan ajaran kaum tradisionalis, yaitu bahwa siapapun (selama tidak mengabaikan Islam) lebih disukai daripada peperangan. Memang pada prinsipnya, seorang sultan yang buruk harus disingkirkan atau dipaksa mengundurkan diri, namun seorang sultan yang berbuat jahat dan keji selama didukung oleh kekuatan militer (syawkah), sehingga sangat sulit untuk melengserkannya, dan upaya untuk

menjatuhkannya hanya akan memunculkan perang saudara yang merusak, maka ia harus dibiarkan menduduki tahtanya, dan setiap orang harus mematuhi.

Pandangan politik al-Ghazali tersebut dapat dipahami sebab pada masa hidup al-Ghazali, dinasti Abbasiyah mengalami masa kemunduran, pada masa tersebut dinasti Abbasiyah secara kekuasaan di bawah dominasi Bani Seljuk, sedangkan khalifah Abbasiyah kedudukannya hanya bersifat spiritual.¹¹ Pada masa itu juga terjadi pertengkarahan paham tentang aliran agama Islam yang sedang memuncak di kota itu, di samping banyaknya penduduk yang menganut agama Masehi dan juga kaum muslimin beraliran Syiah.¹² Al-Ghazali yang kemudian memasuki Madrasah Nidzamiyah (dipimpin oleh ulama besar Imam al-Haramain al-Juwaini, salah seorang tokoh aliran Asy'ariyah). Madrasah Nidzamiyah tersebut didirikan oleh Nizam al-Mulk seorang tokoh Sunni yang menjadi perdana menteri Dinasti Seljuk pada masa pemerintahan Sultan Al Arslan dan Sultan Maliksyah.¹³ Al-Ghazali yang pada akhirnya dipercaya sebagai pimpinan Nidzamiyah (sekitar 25 tahun) banyak membantu perang yang dilancarkan Nizam al-Mulk terhadap gerakan subversif Isma'iliyah, salah satunya dengan menerbitkan buku kerancuan teologi Syi'ah Isma'iliyah Nizariyah.¹⁴ Selain penggunaan dasar al-maslahat dalam setiap pandangan kenegaraannya, hubungan al-Ghazali yang demikian baik dengan Nizam al-Mulk juga dinilai membuat al-Ghazali dapat menampilkan kelenturan sikap ketika berhubungan dengan penguasa.

Jika pemikiran politik Ibn Taimiyah dikaitkan dengan latarbelakang sosial politik yang dihadapinya pada masa itu. Maka pandangannya merupakan refleksi atas kekecewaannya terhadap Dinasti Abbasiyah. Sejak abad ke IX bani Abbas Sudah mulai mengalami kemunduran yakni pada masa khalifah al Watsiq (842-874 M) sampai masa al Mu'tashim. Mereka lebih banyak terlihat seperti khalifah boneka, karena secara de facto hanya diperintah oleh pejabat-pejabat dibawahnya. Namun demikian, ibn Taimiyah juga mengakui bahwasannya pada masa itu

¹¹ Jeje Abdul Rojak, *Politik Kenegaraan Pemikiran-Pemikiran Al-Ghazali....*, h. 86.

¹² H.M.K. Bakry, *Al-Ghazali*, (Jakarta: Penerbit Wijaya, 1957), h. 9.

¹³ Jeje Abdul Rojak, *Politik Kenegaraan Pemikiran-Pemikiran Al-Ghazali....*, h.87

¹⁴ *Ibid*,h. 93

sedikit sekali pemimpin yang memiliki kualifikasi dua sifat yaitu kekuatan dan amanah.¹⁵

Dari pemikiran keempat ulama sunni ini tentang kekuasaan kepala negara yang cenderung memberikan legitimasi kekuasaan, bahwa mereka merumuskan tidak boleh melakukan pemberontakan ataupun oposisi terhadap kepala negara. Larangan oposisi ataupun pemberontakan terhadap kepala negara dalam pemikiran politik sunni ini lebih didasarkan pada akibat buruk yang mungkin akan terjadi dalam masyarakat. Sangat dimungkinkan timbul suasana kekacauan (*chaos*) dalam negara. Oleh karena itu bagi mereka menghindarkan keadaan *chaos* (kekacauan) yang lebih besar merupakan hal yang perlu diambil dan lebih diutamakan. Maka misalnya lebih baik dalam suasana pemerintahan yang despotik, namun masyarakat tidak bergejolak, daripada menolak kepemimpinannya yang mengakibatkan timbul gejolak atau kekacauan dalam masyarakat.

Konsep khalifah (kepala Negara) sebagai *khadim al ummah* (pelayan umat) sepertinya diubah oleh beberapa pemikir sunni menjadi *zhill Allah* (bayang-bayang Allah) yang memiliki kekuasaan besar dan luas. Sehingga kekuasaannya bersifat sakral dan suci.¹⁶ Tentu pemikiran ini tidak terlepas dari kepentingan politik para penguasa untuk mempertahankan kekuasaan dan supremasinya terhadap rakyat. Maka dengan demikian para penguasa dapat dengan aman dalam kedudukan dan posisinya. Selain itu juga, pengaruh-pengaruh kebudayaan asing yang berkembang saat itu terutama Persia yang menempatkan posisi raja (penguasa) sebagai wakil Tuhan di bumi. Tentu ini sedikit banyaknya memberi andil terhadap berjalannya perkembangan konsep tersebut didalam dunia politik Islam sunni. Ini dapat dilihat dari besarnya peran orang-orang Persia dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah.

Pada masa dinasti Abbasiyah pada umumnya pemikir politik Sunni adalah orang-orang yang berkecimpung didalam system pemerintahan. Oleh karena itu teori politik merekapun tidak dapat dilepaskan dari realitas politik yang mereka hadapi saat itu. Tentu tidak mengherankan jika mereka berusaha memberi

¹⁵ Firdaus A.N, *Pedoman Islam Bernegara*, Terj. Ibn Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah fi al Ra'I wa al Ra'iyah*, cet.2 (Jakarta : Bulan Bintang, 1960), h.27

¹⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, cet ke 2 (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2016), h.108

legitimasi dan mempertahankan pemerintah yang berkuasa. Merupakan hal yang logis jika konsep kepatuhan terhadap pemimpin mutlak yang harus dilakukan oleh rakyat kepada penguasa. Selain itu konsep ini mengaburkan visi misi pemikir-pemikir sunni terhadap konsep syura yang pada intinya mengikutsertakan masyarakat dalam mengontrol jalannya pemerintahan. Konsep syura semakin jauh dari teori politik sunni dengan berkembangnya doktrin khilafah sebagai bayang-bayang Allah sehingga tidak dapat diturunkan dari jabatannya.¹⁷

Lembaga *ahl al hall wa al 'aqd* dan syura (musyawarah) memang juga dibahas oleh beberapa pemikir sunni namun tidak secara detail dan mekanismenya tidak secara khusus misalnya siapa yang berhak menjadi anggota *ahl al hall wa al 'aqd* dan bagaimana cara rekrutmen anggota tersebut tidak dijelaskan, sehingga pada akhirnya dalam perjalanan sejarah berikutnya *ahl al hall wa al 'aqd* keberadaannya dipengaruhi kepala negara. Ini disebabkan karena kepala negaralah yang mengangkat mereka. Oleh karena itu mereka cenderung memberikan legitimasi dan bersikap akomodatif terhadap kekuasaan pemerintah. Dalam hal ini *Ahl al hall wa al 'aqd* hanya sekedar sebagai alat legitimasi ambisi politik penguasa dan kebijakan-kebijakannya. Tentu teori ini memberikan tempat bagi kepala negara di posisi yang kuat dan rakyat pada posisi yang lemah. Dalam keadaan ini, rakyat tentu tidak dapat berperan banyak untuk melakukan kontrol terhadap kebijakan-kebijakan kepala Negara.

Kesimpulan

Sunni sebagai kelompok mayoritas, memiliki ciri khas pemikiran politik yang biasanya mendukung atau memihak pemerintah yang sedang berkuasa. Pemikiran-pemikiran dari ulama-ulama politik sunni cenderung sebagai alat legitimasi kekuasaan, sangat memiliki dampak besar dengan pemerintah dalam meletakkan hubungan antar penguasa (pemerintah) dan rakyat dengan mengutamakan keharmonisan sosial, tentu stabilitas sosial dan politik akan terjaga dengan baik. Kalangan ulama sunni yang pada umumnya melarang rakyat (umat Islam) melakukan pemberontakan terhadap penguasa. Pada dunia perpolitikan kelompok ini berpegang pada doktrin kelompok mayoritas yang diantaranya diwakili oleh, Ibn Abi Rabi', Ibn Taimiyah dan al Ghazali maupun al Mawardi.

¹⁷ *Ibid*, h.111

Pemikiran-pemikiran tokoh politik Sunni menggambarkan prinsip yang lebih mengutamakan keharmonisan dan kestabilan dalam politik Islam. Pemikiran tersebut didasarkan pada latar belakang dan kecenderungan tokoh-tokoh Sunni tersebut dalam persoalan politik kenegaraan yang dihadapi pada masa mereka. Mereka mendasari teori politiknya atas kenyataan yang ada, dengan bertitik tolak pada pemberian legitimasi kepada system pemerintahan yang sedang berjalan atau mempertahankan statusquo bagi kepentingan penguasa namun kemudian secara realistic menawarkan saran-saran perbaikan dan reformasi pemerintahan.

Daftar Pustaka

- Al Gahzali, *Al Iqtishad fi al I'tiqad*. Mesir : Maktabah al Jund.1972
- _____. *Ihya' 'Ulum al-Din* I. Bairut: Dar al-Fikr, 1995.
- Al Mawardi. *Al ahkam al Sulthaniyah*. Beirut : Dar al Fikr.
- Abdul Rojak, Jeje. *Politik Kenegaraan Pemikiran-pemikiran Al Ghazali dan Ibn Taimiyah*. Surabaya : Bina Ilmu, 1999
- Firdaus A.N, *Pedoman Islam Bernegara*, terj. Ibn Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah fi al Ra'iyah*, cet.2. Jakarta : Bulan Bintang, 1960
- H.M.K. Bakry. *Al-Ghazali*. Jakarta: Penerbit Wijaya, 1957
- Ibn Taimiyah, *Al Siyasah al Syar'iyah fi Ishlah al Ra'I wa al Ra'iyah*. Beirut: Dar al Afaq, 1983.
- Iqbal, Muhammad. Akar Tradisi Politik Sunni di Indonesia pada Masa Kerajaan Islam di Nusantara "Islamica, Vol. 6, No. 1, September 2011"
- _____. *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, cet ke 2 (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2014
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta : UI Press, 1990
- Syam, Syafruddin. *Pemikiran Politik Islam Imam Al Mawardi dan Relevansinya di Indonesia*. "Al Hadi : Vol. II No 02 Edisi Januari-Juni 2017"